

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Carrington, Keith. 2005. Is There A Need Control?. Public Administration Quarterly, Vol 29.. Hal 78
- Dwiyanto, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerty Press, hal 144
- Eramus, Erwin. Dan Lucy Gilson. 2008. How to Start Thinking About Investigating Power In The Organizational Settings of Policy Impelementation. Journal Health Policy and Planning. Vol 2, No 1. Hal 85
- Evani, Fuska Sani. 2019. 44 KK di Kawasan Rawan Bencana Merapi Akhirnya Bersedia Direlokasi. Berita Satu Nasional
- Evans, Tony. 2011. Professional Manager, Disvretion: Crotiquing Street Level Bureucracy. British Journal of Social Work.
- E. Utrecth. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Faal, M. 1991. Screening Criminal Police (Police Discretion). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadisoepрто, Hartono. 1993. Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Handayani, Deny Apriliya. dan Abdul Rofi. 2013. Perubahan Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pengungsi Desa Kepuharjo Di Shelter Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, D. I Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 2, Nomor 1.

- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi"*, Setara Press, Malang,
- Jamilah, Kharitsatun. 2018. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Vol. 7 Nomor 4.
- Jaya, Ikmal. 2014. Implementasi Kebijakan Diskresi pada Sistem Pelayanan Publik di Kota Tegal dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014*, hal. 207.
- Julaini, Henny. 2018. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Penggunaan Diskresi yang Membebani Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*. Vol 1
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, 2016
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984., *Hukum Pemerintahan Desa* Balai Pustaka, Jakarta, hlm 15-16
- Keiser, Lael R. 1999. State Bureaucrats Discretion and The Adminisraion of Social Welfare Programs: The Case of Social Security Disability. *Journal of Public Administartion Research and Theory; J PART*. Vol 9, No. 1. Januari 1999 hal 87
- Lukman. Markus. 2014. Fries Ermessen dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Potianak. Pascasarjana UNPAD
- Majumdar, Sumit K. 2011. Rules Vs Discretion. *Academy of Management Journal*.

- Maschab, Mashuri, 2013 *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta,
- Moch. Solekhan, 2012 *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setra Press, Malang.
- Moh. Fadli, 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governence)*, UB Press, Cet.2, Malang.
- Mustafa, Bachsan. 2018. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, dalam Tiga Dimensi Hukum*. Bandung: Bandungpress
- Nick Gill, Rebecca Rotter, Andrew Burridge, Jennifer Allsopp , *The Limits of Procedural Discretion: Unequal Treatment and Vulnerability in Britain's Asylum Appeals*, dalam Social & Legal Studies 2018, Vol. 27.
- Nugroho, Setyo, 2013. *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, Jurnal Cita Hukum*, Vol I, No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440
- Panjaitan, Saut P. 2001. *Makna Peranan Freies Ermessen dalam HAN dimuat Dalam Dimensi-dimensi Pemikiran HAN*. Yogyakarta: UII Press.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 45
- Riccucci, Norma M. 2005. *Birokrasi pada tingkat bawah and Intrasteet Variation in The Impelementaion of Temporary assistance for Needy Families Policies*. Journal of Public Administartion Research and Theory; J PART. Vol 15, No 1. Hal 156
- Ridwan.HR, *"Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Ridwan.HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ridwan HR, 2009.*Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Santoso, Purwo, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sihotang, Githa Angela. Pujiyono. 2017. Nabitatus Sa'adah, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat dalam Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, hal. 6.
- Simorangkir, Erwin. T. Rudy. Dan J. T. Prasetyo. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 38.
- S.F. Marbun, dkk, 2002. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Adminsitrase Negara*, UII Press, Yogyakarta,
- S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, LIBERTY, Yogyakarta,
- Sjachran, Basyah. 2004. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni
- Solekhan, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Suhartono, 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong Royong*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, Cet. 1,

Sukrino, Didik, 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Prees, Cet.1, Malang.

Suprpto, dan Abdul Malik. 2019. Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*. Vol 7. Issue 1. Hal 1375-1377.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.

Toersina, Tiara Oliviarizky. Dan Subadi. 2018. Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi di Daerah. *Mimbar Hukum*. Vol 30. No,1.

Tummers, Lars. Dan Bekkers, Victor. 2014. Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance of discretion. *Public Managemet Review*.

Waluyadi, Adamsyah Nadeak, dan Ibnu Artadi. 2019. Impelementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hermeneutika*. Vol 3. No, 1.

Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. 2003. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yan, Pramadya Puspa. 1997. Kamus Hukum. Semarang; Aneka Ilmu.

Yasen TP, 2014 *Revolusi Dari Desa*, Kompas Gramedia, Jakarta,

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan  
Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana  
Gunungapi Merapi.

### **Media Elektronik & Hasil Wawancara**

Burhan, Fahmi Ahmad. 2018. Dilarang Pemerintah, Warga Masih Huni Kawasan  
Rawan Bencana III Merapi. Jogjapolitan Harian Jogja.

Desa Kepuharjo dalam <https://cangkringankec.slemankab.go.id/desa-kepuharjo-2/>  
(diakses 30 November 2019)

Dua Diskresi Satu Petaka dalam  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170422142023-12-209446/dua-diskresi-satu-petaka-bernama-penembakan-lubuklinggau> (diakses 30 Agustus  
2019)

Evani, Fuska Sani. 2019. 44 KK di Kawasan Rawan Bencana Merapi Akhirnya  
Bersedia Direlokasi. Berita Satu Nasional

Kapolri Sebut Penembakan di Lubuklinggau Contoh Diskresi Salah dalam

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-penembakan-di-lubuklinggau-contoh-diskresi-yang-salah.html> (diakses 30 Agustus 2019)

Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprpto , dalam keterangannya pada tanggal 31

Januari 2011 di <https://nasional.tempo.co/read/310162/bosan-di-barak-warga-merapi-bikin-hunian-sementara-mandiri/full&view=ok>

Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprpto dalam keterangannya tanggal 12 Mei 2017

dalam <https://www.suara.com/news/2017/05/12/220630/korban-erupsi-merapi-tak-nyaman-tinggal-di-hunian-tetap>

Media Online Detik, <https://news.detik.com/berita/1489828/kades-kepuharjo-desa-saya-tinggal-setengah?nd992203topnews=>

(diakses 2 Desember 2019)

[digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf) (diakses 8 November 2019)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 8 November 2019)

[www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesesa.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesesa.pdf) (diakses 10 November 2019)

Pemerintah Desa Kepuharjo, dalam <https://kepuharjodes.slemankab.go.id/> (diakses

30 November 2019)

Pemkab Sleman Tegaskan Tak Boleh Bangun Hunian Di KRB III Merapi dalam

<https://tirto.id/pemkab-sleman-tegaskan-tak-boleh-bangun-hunian-di-krb-iii-merapi-dc5o> (diakses 1 Desember 2019)

PKL Trotoar Melawai dan Diskresi dalam

[https://www.medcom.id/nasional/metro/nN9Da73K-pkl-trotoar-melawai-](https://www.medcom.id/nasional/metro/nN9Da73K-pkl-trotoar-melawai-sandi-itu-diskresi)

[sandi-itu-diskresi](https://www.medcom.id/nasional/metro/nN9Da73K-pkl-trotoar-melawai-sandi-itu-diskresi) (diakses 30 Agustus 2019) Profil Desa Kepuharjo dalam

<https://kepuharjo.id/profil-desa/> (diakses 1 Desember 2019)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14461/h.%20BAB%20IV.%20Keadaan%20umum%20lokasi%20penelitian.pdf?sequence=8&isAllowed=y> (diakses 1 Desember 2019)

Puspita, Ratna. 2018. *Aktivitas Merapi Meningkat, Warga Sleman Siapkan Mitigasi*. Nasional Republika.

Tiga Diskresi Mendagri Sikapi Lumpuhnya DPRD Kota Malang dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-diskresi-dari-mendagri-sikapi-lumpuhnya-dprd-kota-malang.html> (diakses 28 Agustus 2019)

Tribun News, “146 KK Korban Merapi Bangun Hunian Tetap”, dalam <https://jogja.tribunnews.com/2011/11/24/146-kk-korban-merapi-bangun-hunian-tetap>. (diakses 2 Desember 2019)

Wawancara dengan Sekretaris Desa Kepuharjo, Tulus Budi Wiratno., S. Sos, 25 November 2019 di Kantor Desa Kepuharjo.